

PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL KOTA MALANG TAHUN 2021

Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
Email: litbangkotamlg@gmail.com

Abstrak: Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya mewujudkan keberhasilan di bidang sosial dan budaya. Kota Malang mengalami jumlah peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan fakir miskin akibat dampak dari adanya wabah Covid-19 pada tahun 2021 ini. Pergeseran anggaran ke bidang kesehatan juga berdampak secara signifikan terhadap pencapaian indikator pembangunan bidang sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur capaian indikator program pembangunan bidang sosial tahun serta mereview target sasaran indikator pembangunan sosial di Kota Malang. Analisis yang dapat digunakan untuk mengukur indikator program pembangunan bidang sosial, yaitu angka kemiskinan, Indeks Modal Sosial (IMS), persentase penurunan PMKS, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan metode evaluasi target capaian urusan kegiatan bidang sosial. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan, nilai IMS Kota Malang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, persentase PMKS di Kota Malang pada tahun 2016-2021 mengalami penurunan, nilai IPMas mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 2,2% serta Kota Malang memiliki nilai IGP tinggi.

Kata kunci: Kota Malang, Pembangunan Bidang Sosial

***Abstract:** Social welfare development is one of the efforts to realize success in the social and cultural fields. Malang city has increased the number of people with social welfare problems (PMKS) and the poor due to the impact of the Covid-19 outbreak in 2021. The shift in budget to the field of health also has a significant impact on the achievement of social development indicators. The purpose of this study is to measure the achievement of indicators of social development program year and review the target target of social development indicators in Malang City. Analysis that can be used to measure the indicator of social development programs, namely poverty rates, Social Capital Index (IMS), percentage decrease in PMKS, Community Development Index (IPMas), Gender Development Index (IPG), and methods of evaluation of targets for the achievement of social activities. Based on the results of the analysis it is known that the poverty rate in Malang City in 2016-2019 decreased, the value of STI in Malang city continues to increase every year, the percentage of PMKS in Malang City in 2016-2021 decreased, the value of IPMas increased in 2021 by 2.2% and Malang City has a high IGP value.*

***Keyword:** Malang City, Social Welfare Development*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya mewujudkan keberhasilan di bidang sosial dan budaya. Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia lebih fokus pada penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas 26 kategori dengan tetap mengoptimalkan penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019).

Rendahnya penanganan masalah sosial menyebabkan masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Malang yang belum tertangani. Pada tahun 2020,

jumlah PMKS di Kota Malang kembali meningkat menjadi 129.844 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 9.712 jiwa karena pada tahun 2019, jumlah PMKS di Kota Malang sebanyak 120.132 jiwa. Berbagai program untuk mewujudkan perlindungan sosial telah diamanatkan untuk dilaksanakan. Akan tetapi, anggaran untuk mewujudkan program tersebut di Kota Malang tentu saja tak seluruhnya dapat mengcover jumlah peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan fakir miskin yang terjadi akibat dampak dari adanya wabah Covid-19 ini pada tahun 2021 ini. Pergeseran anggaran akan berdampak secara langsung dan signifikan terhadap pencapaian indikator pembangunan bidang sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur capaian indikator program pembangunan bidang sosial tahun 2021, melakukan *review* target/sasaran indikator pembangunan bidang sosial yang telah ditetapkan sebelumnya, menganalisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2021 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Malang berdasarkan hasil penelitian.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Robertson dalam buku Mohamad Mahsun (2009), pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang

dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

3. Pembangunan Bidang Sosial

Pembangunan bidang sosial merupakan sebuah proses perubahan sosial yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan yang dilakukan saling melengkapi dengan proses pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Terdapat beberapa prinsip masalah sosial dalam pembangunan sosial, yaitu kompleksitas, komprehensif, interdisipliner dan berkesinambungan (Jusuf, 2007).

4. Indikator Pembangunan Bidang Sosial

Bappenas (2002) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan di bidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

Berdasarkan misi Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, pengukuran indikator pembangunan bidang sosial mencakup lima aspek, yaitu angka kemiskinan, Indeks Modal Sosial (IMS), persentase penurunan PMKS, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

a. Angka Kemiskinan.

Kemiskinan dianggap salah satu ukuran capaian pembangunan di berbagai negara yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan pertama, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.

Dalam mengukur kemiskinan digunakan konsep pemenuhan

kebutuhan dasar. Konsep kebutuhan dasar yaitu untuk mempertahankan hidup dengan tercukupinya makanan, perumahan dan pakaian, dan peralatan serta perlengkapan rumah tangga.

b. Indeks Modal Sosial.

Modal sosial berperan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses sumber daya produktif seperti kredit bank dengan jaringan sosial guna menurunkan tingkat kemiskinan (Van Rijn, Bulte, & Adegunle, 2012).

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan sosial. Modal sosial selalu ada dalam setiap hubungan sosial yang dilakukan antar individu, antar kelompok, antar organisasi atau bahkan antar negara. Indeks modal sosial yang dihasilkan terbentuk dari tujuh faktor, yaitu: sikap percaya, toleransi agama, toleransi suku, resiprositas, partisipasi dalam aksi bersama, partisipasi dalam kelompok, dan jejaring. Ketujuh faktor tersebut telah mencakup tiga pendekatan indikator modal sosial, yaitu (1) sikap percaya, (2), aksi bersama (3) kelompok dan jejaring (Grootaert & Bastelaar, 2002 dalam Badan Pusat Statistik, 2014).

c. Presentas Penurunan PMKS.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penetapan dimensi indikator kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdiri atas indikator dampak, indikator manfaat, indikator keluaran, dan indikator masukan (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan

Kesejahteraan Sosial).

d. Indeks Pembangunan Masyarakat.

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam mengukur kemajuan capaian pembangunan masyarakat dan gambaran mengenai kondisi pembangunan masyarakat Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019). IPMas terdiri atas indeks toleransi, indeks gotong royong, serta indeks rasa aman.

e. Indeks Pembangunan Gender

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.

Indeks pembangunan gender adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012).

METODE

Kegiatan dengan judul “Pengukuran Indikator Program Pembangunan Bidang Sosial” adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, analisis yang dapat digunakan untuk mengukur indikator program pembangunan bidang

sosial, yaitu angka kemiskinan, Indeks Modal Sosial (IMS), persentase penurunan PMKS, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan metode evaluasi target capaian urusan kegiatan bidang sosial.

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi persiapan data awal yang dikumpulkan dari berbagai perangkat daerah terkait dengan pengukuran indikator program bidang sosial Kota Malang, pemetaan lokasi dan wilayah untuk survei, persiapan surat tugas bagi tenaga ahli, supervisor, dan tenaga lapang serta koordinasi tim lapangan melalui pelatihan sebelum turun lapang.

Tahap kegiatan meliputi identifikasi dan analisis angka kemiskinan, IMD, IPMas dan IPG, identifikasi target dan capaian penurunan PMKS, program pembangunan RPJMD Kota Malang serta program pembangunan bidang sosial instansi terkait, identifikasi dan analisis dampak pandemi Covid-19 serta klasifikasi dan evaluasi hasil analisis.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan dengan: *literature review* dan analisis kondisi empiris, perancangan instrumen penelitian berupa kuesioner variabel-variabel, turun lapang oleh tenaga lapang (surveyor) dengan menggunakan teknik wawancara, data yang diperoleh dilakukan analisis guna mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang variabel yang bersesuaian dengan indikator program bidang sosial, tim ahli melakukan konsolidasi dan interpretasi terhadap hasil analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini ditentukan berdasarkan *cascading* misi ketiga Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Teknik analisis tersebut antara lain:

- a. Angka Kemiskinan.
Evaluasi angka kemiskinan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan kajian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021.
- b. Indeks Modal Sosial.
Grootaert & Bastelaar (2002) dalam BPS (2014) merekomendasikan tiga jenis indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan modal sosial pada level mikro, yaitu indikator terkait sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku, keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal, dan indikator terkait aksi bersama.
- c. Persentase Penurunan PMKS.
Persentase penurunan PMKS dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Indeks Pembangunan Masyarakat.
Variabel yang diukur dalam IPMas antara lain adalah indeks toleransi atau sifat menenggang, indeks gotong royong untuk mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, serta indeks rasa aman yaitu keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan serta keamanan dari kekerasan.
- e. Indeks Pembangunan Gender.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG diukur berdasarkan perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. IPM tersebut didapatkan dari perhitungan berdasarkan tiga aspek, antara lain umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

f. Metode Evaluasi Target Capaian Bidang Sosial.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai capaian masing-masing program serta dampaknya apabila target pada indikator tersebut tercapai ataupun tidak. Evaluasi ini dilakukan terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh instansi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 triwulan kedua atau bulan Juni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kota Malang

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada $112^{\circ}06'$ - $112^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}06'$ - $8^{\circ}02'$ Lintang Selatan. Wilayah Kota Malang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan dengan luas 114,2616 km².

Wilayah Kota Malang berada pada ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan dikelilingi oleh kawasan pegunungan. Suhu rata-rata di Kota Malang berkisar antara 22-25°C.

Kota Malang sebagai suatu daerah perkotaan yang umumnya didominasi oleh kawasan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum, kawasan perdagangan dan industri, 75% luas wilayah Kota Malang difungsikan untuk pengembangan kawasan permukiman.

Kota Malang mengalami peningkatan baik ditinjau dari segi ekonomi, pembangunan maupun jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kota Malang bertambah setiap tahun. Pada tahun 2000, jumlah penduduk di Kota Malang adalah 756.982 jiwa, meningkat pada tahun 2010 sehingga jumlah penduduk berjumlah 820.243 jiwa, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 843.810 jiwa.

PDRB di Kota Malang memiliki klasifikasi menjadi 17 sektor, yaitu

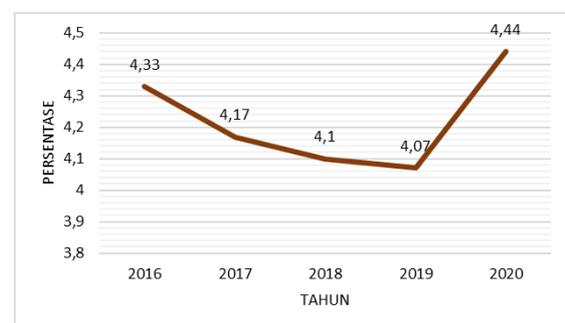
sektor pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; sampah, limbah dan daur ulang; perdagangan; transportasi dan pergudangan; penyedia akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Nilai PDRB Kota Malang berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 72.163,2 miliar rupiah. Perekonomian Kota Malang paling besar ditopang oleh sektor perdagangan dan reparasi kendaraan bermotor.

2. Angka Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur angka kemiskinan. Tabel 1. dan Gambar 1. merupakan perkembangan angka kemiskinan di Kota Malang Tahun 2016-2020.

Tabel 1. Persentase Angka Kemiskinan

Persentase Angka Kemiskinan	
Tahun	Persentase
2016	4,33%
2017	4,17%
2018	4,10%
2019	4,07%
2020	4,44%



Gambar 1. Capaian Angka Kemiskinan Kota Malang 2016-2020

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2021

Angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan hingga 4,07%. Akan tetapi,

pada tahun 2020, angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,37% atau 3.380 jiwa menjadi 4,44%.

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan target pengurangan angka kemiskinan selama lima tahun ke depan.

Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi
2018	4,1%	4,1%
2019	3,91%	4,07%
2020	3,76%	4,44%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)



Gambar 2. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kemiskinan

Kondisi ini berbanding lurus dengan jumlah PMKS yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, jumlah PMKS juga mengalami peningkatan menjadi 129.844 jiwa.

3. Indeks Modal Sosial

Indikator yang digunakan dalam pengukuran IMS antara lain sikap percaya dan toleransi, aksi bersama, dan kelompok dan jejaring. Tabel 3 merupakan nilai IMS di Kota Malang berdasarkan masing-masing komponen.

Tabel 3. Nilai Indeks Komponen IMS

Komponen IMS	Nilai Indeks
Sikap Percaya dan Toleransi	81,86
Aksi Bersama	91,43
Kelompok dan Jejaring	74,65

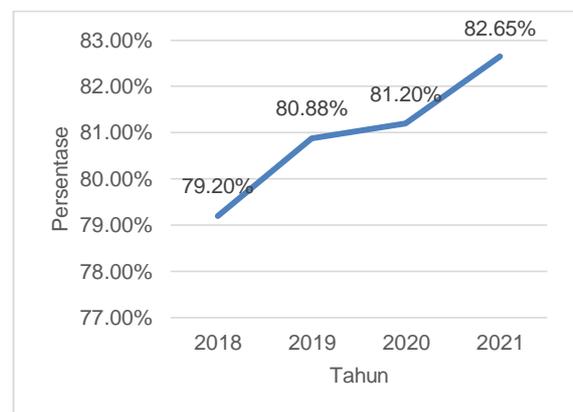
Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)

Nilai indikator aksi bersama memiliki nilai yang paling tinggi di antara dua indikator lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan sangat baik.

Tabel 4. Persentase IMS Kota Malang Tahun 2018-2020

Tahun	Persentase
2018	79,20%
2019	80,88%
2020	81,20%
2021	82,65%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)



Gambar 3. Capaian IMS Tahun 2018-2021

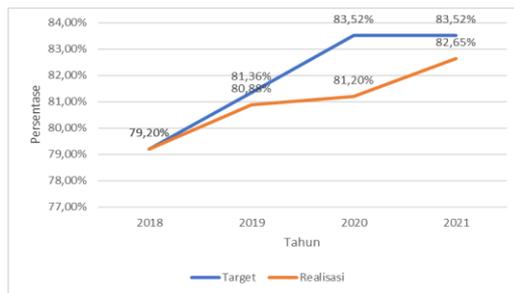
IMS Kota Malang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai IMS Kota Malang sebesar 82,65%. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,45. Kenaikan IMS menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki kesadaran individu yang tinggi dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Apabila nilai IMS masyarakat Kota Malang semakin tinggi, maka efektivitas pembangunan juga akan semakin meningkat. Fukuyama (1999) menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memperkuat kehidupan masyarakat modern.

Tabel 5. Perbandingan Target IMS Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi
2018	79,2%	79,20%
2019	81,36%	80,88%
2020	83,52%	81,20%
2021	83,52%	82,65%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)



Gambar 4. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Modal Sosial

Persentase Indeks Modal Sosial masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 83,52%, tetapi realisasi yang didapatkan hanya sebesar 82,65% dengan selisih 0,87% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya penguatan modal sosial atau perlu ada upaya-upaya tambahan untuk meningkatkan persentase realisasi IMS Kota Malang.

4. Persentase Penurunan PMKS

Persentase penurunan PMKS dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial.



Gambar 5. Persentase Penurunan PMKS

Sumber: DinsosP3AP2KB Kota Malang (2021)

Persentase penurunan PMKS berfluktuasi. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran/motivasi diri PMKS, terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial, serta belum optimalnya kemitraan lintas sektoral.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Persentasi Penurunan PMKS

Tahun	Target	Realisasi
2018	-2,23%	-1,46%
2019	5%	3,31%
2020	5%	1,08%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)



Gambar 6. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penurunan PMKS

5. Indeks Pembangunan Masyarakat

Nilai IPMas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang tiga indeks, yaitu Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi, dan Indeks Rasa Aman. Nilai rata-rata ini didapatkan dari hasil kuesioner kepada 421 sampel masyarakat Kota Malang yang termuat dalam dokumen Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2021.

Tabel 7. Nilai IPMas Berdasarkan Komponen

Komponen IPMas	Nilai Indeks
Indeks Gotong Royong	82,45
Indeks Toleransi	89,15
Indeks Rasa Aman	80,86
Indeks Pembangunan Masyarakat	84,15

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)

Diketahui bahwa keseluruhan indikator dalam komponen IPMas telah berada di atas nilai 80, sehingga dapat dikatakan indikator-indikator tersebut

memiliki nilai yang baik.

Tabel 8 merupakan perkembangan indeks pembangunan masyarakat Kota Malang pada tahun 2018-2021. Di mana untuk data pada tahun 2021 yang digunakan dalam indeks pembangunan masyarakat Kota Malang data sampai bulan juni 2021 atau data sampai triwulan kedua.

Tabel 8. Persentase Indeks Pembangunan Masyarakat Tahun 2018-2021

Tahun	Persentase
2018	82,90%
2019	84,60%
2020	81,95%
2021	84,15%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)



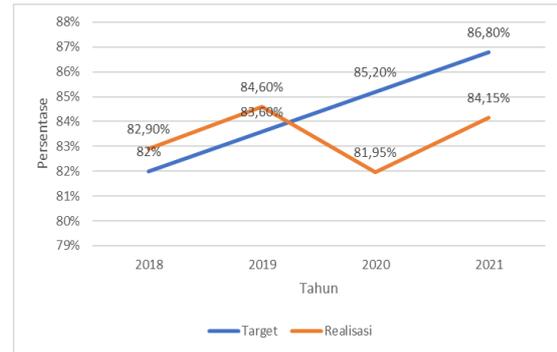
Gambar 7. Indeks Pembangunan Masyarakat Tahun 2018-2021

Peningkatan nilai IPMas dikarenakan adanya peningkatan peran masyarakat dalam berbagai kegiatan, khususnya kegiatan perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hal ini selaras dengan peningkatan Indeks Toleransi masyarakat Kota Malang. Semakin banyak masyarakat yang turut serta dalam suatu kegiatan, maka Indeks Toleransi masyarakat juga akan mengalami peningkatan.

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi
2018	82%	82,90%
2019	83,6%	84,60%
2020	85,2%	81,95%
2021	86,8%	84,15%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)



Gambar 8. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Ketika pandemi Covid-19 muncul pada tahun 2020, IPMas mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 81,95%. Nilai tersebut memiliki selisih cukup jauh dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu 2,65%. Pada tahun 2021, dengan adanya era *new normal*, nilai IPMas Kembali mengalami peningkatan menjadi 84,15%.

6. Indeks Pembangunan Gender

Komponen pembentuk IPG antara lain angka harapan hidup pada saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan perkiraan pendapatan. Nilai dalam IPG didapatkan dari hasil pengolahan data BPS dalam Kota Malang Dalam Angka Tahun 2021.

Tabel 10. Persentase Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2018

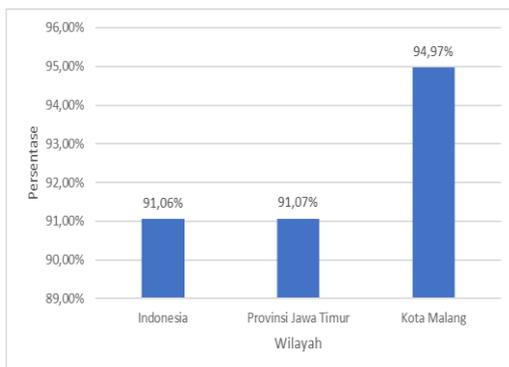
Tahun	Persentase
2016	95,20%
2017	94,96%
2018	94,71%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)



Gambar 9. Capaian IPG Kota Malang Tahun 2016-2020

Apabila dibandingkan dengan IPG nasional maupun IPG provinsi, IPG Kota Malang termasuk tinggi dengan selisih sebesar 3,51 untuk IPG nasional dan 3,50 untuk IPG provinsi. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki IPG sebesar 91,06, sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki IPG sebesar 91,07. Tingginya indeks IPG merupakan salah satu dampak dari peningkatan kesetaraan gender.



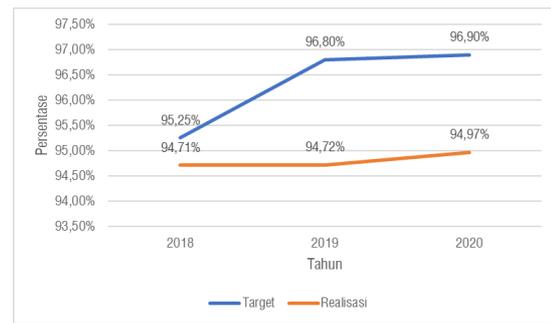
Gambar 10. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Indonesia, Jawa Timur, dan Kota Malang Tahun 2020

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, dan angka rata-rata lama sekolah telah diprioritaskan untuk diwujudkan dalam misi pertama, yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Sementara untuk variabel keempat juga telah diprioritaskan dalam misi kedua, yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi
2018	-2,23%	-1,46%
2019	5%	3,31%
2020	5%	1,08%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)



Gambar 11. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel 11 dan Gambar 11 menunjukkan bahwa perlu adanya upaya-upaya tambahan untuk terus meningkatkan nilai IPG di Kota Malang. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target IPG pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu pelibatan perempuan pada setiap kegiatan dengan persentase seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan.

7. Evaluasi Target Capaian

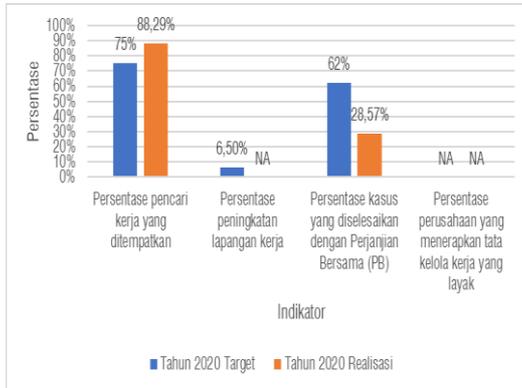
Evaluasi target capaian terhadap hasil Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 mencakup rencana program bidang sosial dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 terdapat 18 program dengan 23 indikator yang akan dievaluasi dalam kegiatan ini. Program tersebut merupakan bagian dari perwujudan misi ketiga, yaitu Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender.

Instansi penanggung jawab program Perubahan RPJMD Kota Malang tersebut meliputi:

- a. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 misi ketiga, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan dua program, yaitu:

- 1) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 2) Program Hubungan Industrial.



Gambar 12. Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

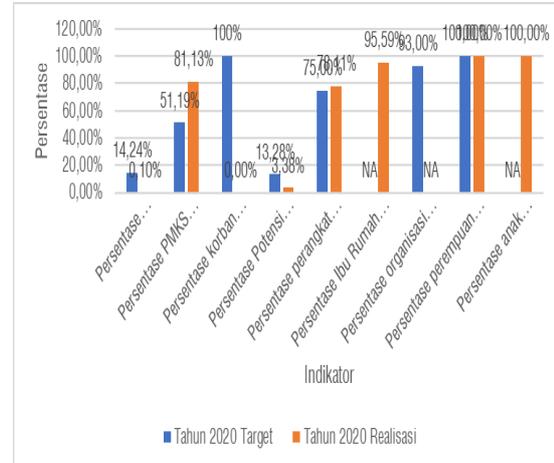
Ada satu indikator yang memiliki efektivitas sangat tinggi pada tahun 2020, yaitu persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan capaian sebesar 117,72%. Pada tahun 2021, indikator tersebut telah memiliki efektivitas yang tinggi karena dilaksanakannya pembinaan stakeholder secara berkala.

- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 misi ketiga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan sembilan program, yaitu:

- 1) Program Rehabilitasi Sosial;
- 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) Program Penanganan Bencana;
- 4) Program Pemberdayaan Sosial;
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 6) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 7) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

- 8) Program Perlindungan Perempuan;
- 9) Program Perlindungan Khusus Anak.



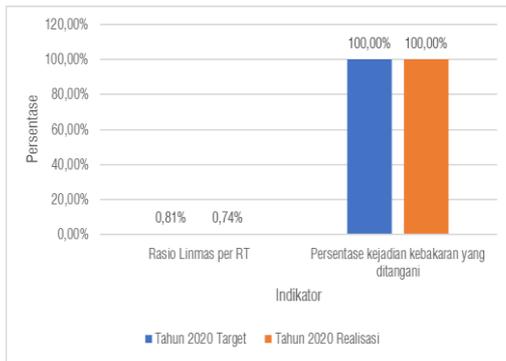
Gambar 13. Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ada satu indikator yang belum dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB yaitu persentase organisasi perempuan yang aktif, sehingga belum memiliki nilai capaian. Indikator tersebut direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Lima indikator lainnya telah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi karena keseluruhan indikator tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Hal ini dikarenakan masing-masing indikator telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB dalam bentuk beberapa kegiatan terkait.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 misi ketiga, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan dua program, yaitu:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.



Gambar 14. Perbandingan Target dan Realisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Seluruh indikator memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Akan tetapi, untuk indikator rasio linmas per RW masih belum mencapai angka 100% pada tahun 2020 karena adanya *refocusing* anggaran pada Bidang Satlinmas Satuan Polisi Pamong Praja yang mengakibatkan kurang maksimalnya perwujudan indikator. Untuk indikator lainnya, yaitu persentase kejadian kebakaran yang ditangani telah terlaksana dengan maksimal karena seluruh kejadian kebakaran di Kota Malang telah tertangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 misi ketiga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan satu program, yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

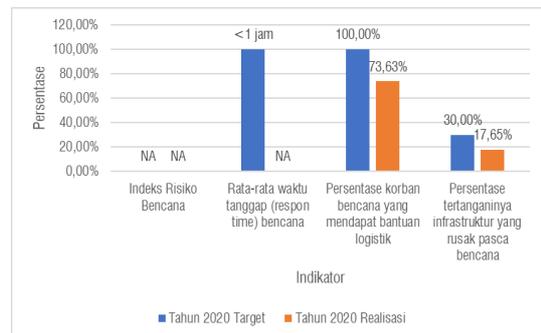


Gambar 15. Perbandingan Target dan Realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan telah mencapai target yang ditentukan dan memiliki tingkat efektivitas sangat tinggi. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai perwujudan indikator tersebut, salah satunya adalah Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), program kewaspadaan daerah dan program pengembangan wawasan kebangsaan. Sementara itu, pada tahun 2021, tingkat efektivitas termasuk ke dalam klasifikasi sedang karena kegiatan perwujudan indikator tersebut masih belum selesai dilaksanakan. Akan tetapi, kegiatan ini telah dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan mengadakan Rakor Forkopimda dan Tim Terpadu.

- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 misi ketiga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan satu program, yaitu Program Penanggulangan Bencana.



Gambar 16. Perbandingan Target dan Realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

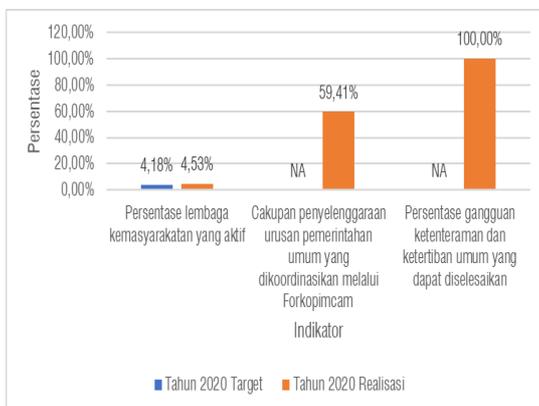
Belum ada indikator yang memiliki tingkat efektivitas tinggi. Dua indikator, yaitu Indeks Risiko Bencana dan rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana memiliki tingkat

efektivitas sangat rendah karena perwujudan indikator ini akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kemudian untuk tingkat efektivitas indikator persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik masih tergolong sedang karena terdapat ketidakharmonisan dan kekurangpahaman akan tugas dan fungsi di internal Bidang Kedaruratan dan Logistik. Hal ini menyebabkan bantuan tidak tersalurkan dengan lancar kepada masyarakat terdampak bencana. Sementara itu, indikator persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana memiliki tingkat efektivitas rendah karena tidak seimbang jumlah bencana yang terjadi di Kota Malang dengan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Hal tersebut berdampak pada rendahnya jumlah infrastruktur yang dapat diperbaiki pasca bencana.

f. Kecamatan

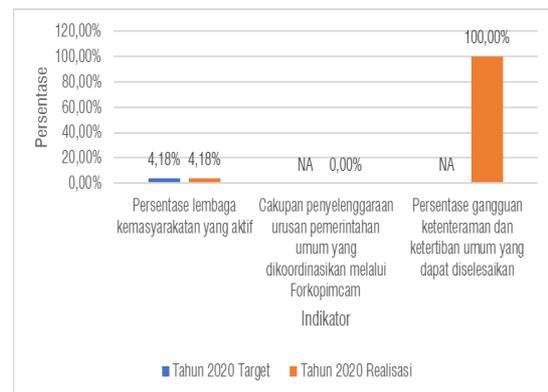
Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 misi ketiga, Kecamatan melaksanakan tiga program, yaitu:

- 1) Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
- 2) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 3) Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum



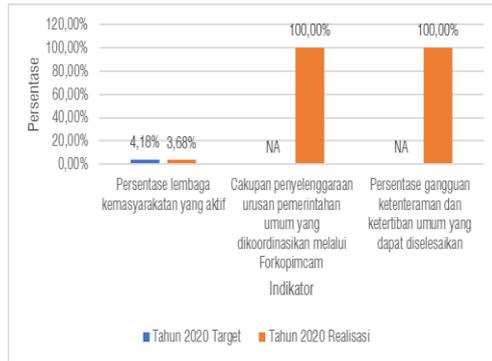
Gambar 17. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Klojen

Ada satu indikator yang memiliki efektivitas tinggi pada tahun 2021, yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan capaian sebesar 91,67%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan dikarenakan koordinasi dan fasilitasi yang semakin baik dilakukan diberikan oleh perangkat daerah. Sementara itu, untuk dua indikator lainnya, yaitu cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam dan persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan memiliki efektivitas sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan *refocusing* anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.



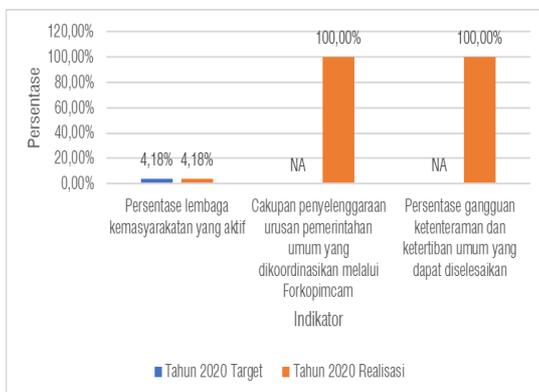
Gambar 18. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Lowokwaru

Dua indikator memiliki efektivitas sangat tinggi pada tahun 2020, yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dan persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan seluruh indikator tersebut telah dilaksanakan selama satu tahun penuh oleh Kecamatan Lowokwaru, sehingga target yang ditetapkan telah terpenuhi seluruhnya.



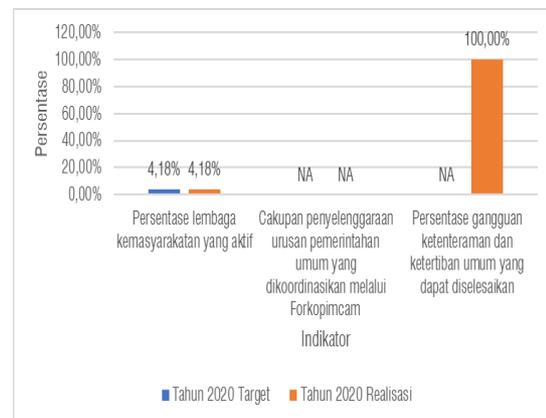
Gambar 19. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Blimbing

Terdapat tiga indikator memiliki efektivitas sangat tinggi pada tahun 2020, yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam, dan persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan seluruh indikator tersebut telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, seperti pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, sehingga target yang ditetapkan telah terpenuhi seluruhnya selama 12 bulan penuh. Sementara itu, pada tahun 2021, tingkat efektivitas yang dimiliki masih sangat rendah karena adanya *refocusing* anggaran akibat penanganan Covid-19, sehingga anggaran lebih difokuskan terhadap pemulasaran jenazah, patroli keliling, dan PPKM.



Gambar 20. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Kedungkandang

Terdapat ketiga indikator memiliki efektivitas sangat tinggi pada tahun 2020, yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam, dan persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan seluruh indikator tersebut telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, sehingga target yang ditetapkan telah terpenuhi seluruhnya.



Gambar 21. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Sukun

Indikator persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif memiliki efektivitas sangat tinggi pada tahun 2020. Indikator ini memiliki nilai capaian yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 100%. Hal ini karena indikator tersebut telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dengan tingkat RT. Indikator kedua, yaitu cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam, memiliki tingkat efektivitas rendah karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 yang difokuskan kepada pengurusan jenazah serta pemberlakuan PPKM di Kecamatan Sukun. Kemudian untuk indikator ketiga, yaitu persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan memiliki tingkat efektivitas sangat tinggi pada tahun 2020 dan sedang pada tahun 2021. Tingkat efektivitas

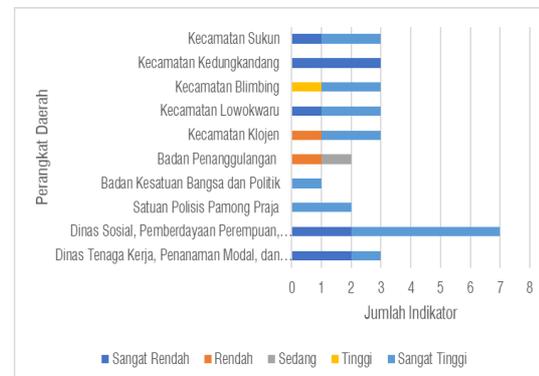
sedang tersebut dikarenakan indikator ini mengalami perubahan target, sehingga tingkat capaian yang sebelumnya direncanakan sebesar 100% turun menjadi 68%. Solusi dari permasalahan ini adalah perencanaan pelaksanaan indikator akan dialihkan pada tahun berikutnya, sehingga target yang telah ditentukan dapat tetap dicapai.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan proses pembangunan mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, yang memiliki visi pembangunan “Kota Malang Bermartabat”. Bidang sosial diwujudkan dalam misi ketiga Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan hingga 4,07%. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga pendapatan maupun daya beli masyarakat mengalami penurunan. Peningkatan nilai IMS dapat didorong dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Persentase penurunan PMKS di Kota Malang pada tahun 2016-2021 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran/motivasi diri PMKS, terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial, serta belum optimalnya kemitraan lintas sektoral. Nilai IPMas mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 2,2%. Peningkatan nilai IPMas dikarenakan adanya peningkatan peran masyarakat dalam berbagai kegiatan, khususnya kegiatan perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Tingginya indeks IPG merupakan salah satu dampak dari penurunan ketimpangan gender.

Hasil analisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2021 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut.



Gambar 22. Efektivitas Capaian Target

SARAN

Program pelatihan kewirausahaan juga dapat dilakukan agar masyarakat dapat membangun usaha sendiri sesuai dengan bidang mereka masing-masing sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Malang.

Masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut serta dapat turut serta mengambil keputusan penting dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat akan dengan mudah menyalurkan aspirasi mereka.

Pelaksanaan berbagai pendampingan bagi masyarakat miskin untuk membuka peluang usaha serta penambahan sarana dan prasarana panti sosial juga perlu dilakukan agar penanganan PMKS lebih optimal.

Penambahan poskamling pada setiap RT agar setiap warga merasa aman saat bertempat tinggal di Kota Malang.

Pelaksanaan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan yang dilakukan sejak pendidikan usia dini dan pelaksanaan pendampingan bagi pengusaha perempuan pemula sampai mandiri dengan melibatkan perguruan tinggi maupun pihak swasta.

Tabel 12. Rekomendasi

No.	Perangkat Daerah	Rekomendasi
1.	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilakukan dengan perencanaan pengembangan ekonomi lokal secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya menguatkan kemampuan sektor informal melalui pembinaan pelaku usaha. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas sektor pada instansi pemerintah melalui penciptaan lapangan kerja di sektor usaha-usaha produktif yang memiliki daya tarik dan daya saing tinggi juga merupakan strategi lain yang dapat diupayakan oleh pemerintah.
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap bulan terkait indikator ini agar target dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap bulan terkait indikator ini agar target dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap bulan terkait indikator ini agar target dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap bulan terkait indikator ini agar target dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.
		Peningkatan capaian pada indikator ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan harapan jumlah fakir miskin dapat berkurang.
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap bulan terkait indikator ini agar target dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap bulan terkait indikator ini agar target dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.
		Peningkatan capaian pada indikator ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kajian lebih lanjut mengenai <i>gender awareness</i> pada level pembuat keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang responsif gender.
		Peningkatan capaian pada indikator ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan perwujudan kualitas keluarga berkesetaraan gender dan hak anak sesuai dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap bulan terkait indikator ini agar target dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.
		Peningkatan capaian pada indikator ini dapat dilakukan dengan penegakan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penghimbau kepada masyarakat mengenai akibat dari KDRT.
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan kualitas linmas dapat dilakukan dengan pengadaan pelatihan linmas secara berkala pada setiap bulan serta menambah jumlah poskamling dengan ketentuan satu RT satu poskamling. Selain itu, pemanfaatan dana yang tersedia perlu dilakukan agar kegiatan perwujudan indikator yang belum maksimal dapat terealisasi.
		Peningkatan persentase kejadian kebakaran yang terjadi dapat dilakukan dengan membuat inovasi baru, yaitu pembuatan aplikasi E-Damkar. Aplikasi ini dapat mempercepat pelayanan petugas kebakaran karena masyarakat bisa langsung mengakses aplikasi tersebut saat terjadi kebakaran di sekitar lingkungan mereka.
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memaksimalkan dana yang tersedia agar kegiatan perwujudan indikator yang belum maksimal dapat terealisasi.
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperbarui kajian pada setiap tahunnya agar nilai indeks Risiko Bencana yang diperoleh dapat sesuai dengan kondisi terkini.
		Pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar nantinya pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditentukan.
		Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang agar lebih memahami tugas pokok dan fungsi Internal Bidang Kedaruratan dan Logistik.
		Memaksimalkan dana yang tersedia agar kegiatan perwujudan indikator yang belum maksimal dapat terealisasi.
6.	Kecamatan	Mempertahankan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan dengan koordinasi dan fasilitasi agar capaian target sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelaksanaan forum terjadwal pada setiap bulan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan seluruhnya.
		Memaksimalkan dana yang tersedia agar kegiatan perwujudan indikator yang belum maksimal dapat terealisasi.
		Pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan peningkatan dan perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan, agar pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditentukan.

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang (2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2021). Kota Malang Dalam Angka Tahun 2021. Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- Jusuf, C. (2007). Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* XII (1): 74-80
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2012). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Malang. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023*. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Van Rijn, F., Bulte, E., & Adekunle, A. (2012). Social Capital and Agricultural Innovation in Sub-Saharan Africa. *Agricultural Systems*, 108(C), 112–122. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* XXIII (2): 317-338.